

DRAFT RANCANGAN RENSTRA BBPOM
BANDUNG 2025- 2029
PER 31 JANUARI 2025



**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR POMDI BANDUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (BBPOM di Bandung) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang berada di Jawa Barat untuk mengemban tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BBPOM di Bandung menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang cukup dinamis dengan luas wilayah berupa daratan seluas 35.377,76 km². dan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi. Jawa Barat terbagi menjadi 27 wilayah yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, dengan 627 Kecamatan dan 5.957 Desa/Kelurahan di Jawa Barat terdiri dari 2.672 urban dan 3.285 rural.

Jawa Barat memiliki populasi sekitar 49,8 juta jiwa (BPS, 2023), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32% yang berasal dari kelahiran yang tinggi dan migrasi dari daerah lain, terutama pada daerah-daerah urban. Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu pusat ekonomi dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, ada sebanyak 266.402 Industri Mikro dan Kecil yang berusaha di bidang Farmasi dan Pangan Olahan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri makanan	250.155	556.360
2	Industri minuman	15.495	34.594
3	Industri Farmasi	752	1.501

Jumlah	266.402	592.455
--------	---------	---------

Dengan kondisi ekonomi dan sosial Jawa Barat yang sangat besar dan dinamis tersebut, membuat BBPOM di Bandung dituntut untuk dapat memberikan peran yang lebih dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara efektif dan efisien memberikan perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat.

Rencana Strategis BBPOM di Bandung untuk periode 2025-2029 disusun tidak hanya untuk mengantisipasi resiko dan perubahan eksternal berupa tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tapi juga sebagai pemberi arah yang jelas dan memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal yang dapat melindungi masyarakat, sekaligus juga menumbuhkan industry farmasi dan pangan olahan yang berdaya saing, dan tetap memastikan masyarakat Jawa Barat memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

- Capaian Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020 – 2024

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja BBPOM di Bandung bersifat fluktuatif diatas 100%. capaian tertinggi ada pada Tahun 2022 sebesar 104,93% dan terendah pada Tahun 2021 sebesar 101%, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Pengukuran kinerja BBPOM di Bandung mengacu kepada ketercapaian 11 Sasaran Kegiatan, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024. Penyusunan Sasara Kegiatan BBPOM di Bandung tersebut menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC) yang dibagi dalam 3(tiga) perspektif, yaitu stakeholder perspective, internal process perspective, dan learning ang growth perspective. Nilai kinerja BBPOM di Bandung berdasarkan perspektif adalah sebagai berikut :

Persektif	Sasaran Kegiatan		Nilai Capaian Sasaran Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective	1.	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.42	99.81	104.11	106.03	101.16
	2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan	93.54	110.32	111.66	111.13	108.80

Persektif	Sasaran Kegiatan		Nilai Capaian Sasaran Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
		makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung					
	3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.24	95.95	100.31	102.30	101.44
	Nilai Perspektif		100.73	102	105.36	106.48	103.80
Internal Process Perspective	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.66	101.38	107.60	103.82	101.82
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.94	99.82	100.05	100.01	100
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	108.75	89.42	97.97	99.37	100
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	84.23	120	120	120	85.98
	Nilai Perspektif		99.65	103	106.40	105.80	96.95
Learning And Growth Perspective	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	93.76	98.53	100.43	100.72	99.51
	9	Terwujudnya sdm BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	104.77	1077.32	107.38	111	97.24
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	113.27	84.67	109.05	102.86	100.41

Persektif	Sasaran Kegiatan		Nilai Capaian Sasaran Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	105.50	100.01	95.22	92.34	114.51
	Nilai Perspektif		104.33	98	103.02	101.73	104.81
Nilai Kinerja UPT BBPOM di Bandung			101.57	101	104.93	104.67	101.85

Sesuai dengan Rencana Strategis BBPOM di Bandung periode Tahun 2020-2024, capaian kinerja BBPOM di Bandung diukur dengan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 11 Sasaran Kegiatan, yang tersusun dalam 3 persektif. Capaian IKU dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 1 – Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	97,62	120.82	97	95.88	98.85	97.50	88.48	90.75	98	97.36	99.35	98.50	96.71	98.19
IKU 2 – Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	76.80	98.46	80	87.06	108.83	82	89.42	109.05	84	88.17	104.96	88.80	90.42	101.82
IKU 3 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94.49	104.99	94	91.96	97.83	95.50	87.79	91.93	96	95,68	99,67	96.50	95.38	98.84
IKU 4 – Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	67.25	93.40	70	74.16	105.94	72	81.54	113.25	78	82.81	106.17	82.90	82.39	99.38
IKU 5 – Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	70	61.33	87.62	72	83.23	115.60	78	97.6	125.13	90	96.80	107.56
Capaian SK 1	104.42			99.81			104.11			106.03			101.16		

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C												
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 6 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	67.35	93.54	71	78.33	110.32	74	82.63	111.66	78	86.68	111.13	86.70	94.33	108.80
Capaian SK 2	93.54			110.32			111.66			111.13			108.80		
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 7 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.82	109.42	91.10	91.10	100	92.30	94.40	102.28	93.4	97.3	104.18	97.50	97.55	100.05
IKU 8 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	75.43	106.24	77.83	69.12	88.81	80.22	77.61	96.75	82.62	83.72	101.33	85.01	88.57	104.19
IKU 9 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	88.5	85.91	97.07	89.50	93.27	104.21	90.50	92.24	101.92	91	92.26	101.38	92.75	92.82	100.08
Capaian SK 3	104.24			95.95			100.31			102.30			101.44		
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 10 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	96.85	111.32	96	92.1	95.94	97	97.71	100.73	98	100	102.04	99	99.56	100.57

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
IKU 11 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56.90	51.89	91.20	64	56.14	87.72	71	80.40	113.24	78	89.96	115.33	90	94.64	105.16
IKU 12 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86.51	101.78	88	101.63	115.48	91	100	109.89	94	99.45	105.80	99.78	99.81	100.03
IKU 13 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	56.59	113.18	57	51.13	89.71	61	61.50	100.82	66	66.26	100.40	70	64.37	91.96
IKU 14 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	73.69	96.96	74	86.16	116.44	76	80.59	106.04	78	80.79	103.57	81	82.64	102.02
IKU 15 - Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3.7	4.2	113.51	4.35	4.48	102.99	4.45	4.67	104.94	4.4	4.14	94.09	4.45	4.90	110.11
IKU 16 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	90.48	117.50	79	83.33	105.48	100	100	100
IKU 17 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	99.50	104.74

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C									
Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota															
Capaian SK 4	104.66			101.38			107.60			103.82			101.82		
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 18 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.43	90.70	103.74	92	91.35	99.29	93.80	93.98	100.19	95.7	95.75	100.05	96.6	96.6	100
IKU 19 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	42	42	100	76	76	100	112	112	100	138	138	100
IKU 20 - Jumlah desa pangan aman	6	6	100	19	19	100	28	28	100	37	37	100	45	45	100
IKU 21 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100	8	8	100	13	13	100	18	18	100	21	21	100
Capaian SK 5	100.94			99.82			100.05			100.01			100		
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 22 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	89.75	109.45	100	87.03	87.03	100	96.02	96.02	100	99.07	99.07	100	100	100
IKU 23 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	88.60	108.05	100	91.82	91.82	100	99.91	99.91	100	99.66	99.66	100	100	100
Capaian SK 6	108.75			89.42			97.97			99.37			100		
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 24 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	74	62.33	84.23	65	83.40	128.32	67	86.64	120	70	84.88	121.26	80	68.78	85.95

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C									
bidang Obat dan Makanan															
Capaian SK 7	84.23			128.32			120			121.26			85.95		
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal															
IKU 25 - Indeks RB BBPOM di Bandung	91	80.15	88.08	82.80	82.66	99.83	83.80	89.17	106.41	84.8	91.47	107.87	92.47	91.24	98.67
IKU 26 - Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	80.54	99.43	83	80.70	97.23	85.50	80.76	94.46	88	82.34	93.57	84	83.03	98.85
IKU 27 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.64	97.63	101.02
Capaian SK 8	93.76			98.53			100.43			100.72			99.61		
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal															
IKU 28 - Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78.58	104.77	79	84.78	107.32	80	85.90	107.38	81	89.91	111	91.32	88.80	97.24
Capaian SK 9	104.77			107.32			107.38			111			97.24		
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKU 29 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	71.50	94.08	79	76.50	96.84	84	82.40	98.10	89	87	97.75	88.04	88.76	100.82
IKU 30 - Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1.51	2	132.45	2	1.45	72.50	2.25	2.88	120	2.8	2.88	102.86	3	3	100
Capaian SK 10	113.27			84.67			109.05			102.86			100		
SK11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel															
IKU 31 - . Nilai Kinerja Anggaran	93	95.14	102.30	95.10	90.78	95.46	95.30	90.74	95.22	95.6	88.28	92.34	91.01	94.89	104.26

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
BBPOM di Bandung															
IKU 32 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	92	100	108.70	95	99.33	104.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKU 33 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.28	95	126.20
IKU 34 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	95	
IKU 35 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73.90	123.17
Capaian SK 11		105.50			100.01			95.22			92.34			104.81	

Capaian kinerja BBPOM Bandung Tahun 2024, sebagai akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, terdapat 5 (delapan) Sasaran Kegiatan yang tercapai, dengan kategori "SANGAT BAIK", 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori "BAIK", dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang tidak tercapai, dengan kategori "CUKUP".

Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori "SANGAT BAIK" adalah sebagai berikut :

1. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung
3. SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
4. SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung
5. SK11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel

Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori "BAIK" adalah sebagai berikut :

1. SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
3. SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan yang tidak tercapai dengan kategori "CUKUP" adalah sebagai berikut :

1. SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal
3. SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal

I.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat pada periode Tahun 2025-2029 harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Selain aspek politik, ekonomi, sosial dan iptek, juga harus responsive terhadap dinamika kesehatan nasional dan global serta dapat mengatasi ancaman kesehatan yang baru (emerging diseases) yang mungkin terjadi di rentang periode ini.

Pemetaan dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan strategis perlu dilakukan untuk dapat menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki dan tantangan-tantangan masalah yang akan dihadapi. Sehingga dapat merancang strategi pengawasan yang efektif, handal, dan responsive, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Rancangan strategi pengawasan ini harus disusun melalui analisis lingkungan strategis secara holistik dan komprehensif. Analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

A. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Analisis kondisi lingkungan strategis internal BBPOM di Bandung dilakukan untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kekuatan yang memiliki peranan vital dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dan juga aspek-aspek yang menjadi kelemahan secara internal yang dapat menghambat pelaksanaan dan keberhasilan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan. Adapun aspek Kekuatan dan Kelemahan dari BBPOM di Bandung dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (Strength), terdiri dari :
 1. Regulasi
 2. Komitmen Kepemimpinan yang kuat
 3. Kompetensi SDM
 4. Pemanfaatan Teknologi
 5. Laboratorium tersertifikasi
 6. Sarana pelayanan publik
- Kelemahan (Weakness), terdiri dari :
 1. Kapasitas kelembagaan BPOM yang belum optimal
 2. Jumlah dan distribusi SDM yang belum memadai
 3. Adanya gap kompetensi SDM
 4. Sistem Teknologi Informasi yang belum terintegrasi dan tidak optimal
 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
 6. Dukungan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang optimal

B. Identifikasi Peluang dan Ancaman

Analisis kondisi lingkungan strategis eksternal BBPOM di Bandung dilakukan untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi peluang untuk perkuatan dan peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dan juga aspek-aspek ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut adalah aspek Peluang dan Ancaman dari kondisi lingkungan strategis dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

- Peluang (Opportunities), terdiri dari :
 1. Kondisi perekonomian wilayah kerja yang berkembang pesat
 - a. Peningkatan jumlah industri sediaan farmasi dan pangan olahan
 - b. Peningkatan akses jalur distribusi ke seluruh wilayah kerja
 2. Kondisi sosial wilayah kerja yang berkembang
 - a. Tingkat pendidikan
 - b. Tingkat literasi digital
 - c. Tingkat penggunaan / akses terhadap teknologi informasi
 3. Kerjasama dengan stakeholder telah terjalin dengan baik
 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
 5. Penerapan Teknologi Informasi dan digitalisasi
 6. Kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung
 7. Kebijakan suprasistem terkait sediaan farmasi dan pangan olahan
 8. Penguatan isu kesehatan global

- Ancaman (Threats), terdiri dari :
 1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan di bidang Obat dan Makanan yang masih rendah
 2. Terdapat ketimpangan sosial yang cukup tinggi antar daerah kabupaten / kota di wilayah kerja
 - a. Ketimpangan urban dan rural
 - b. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia
 - c. Ketimpangan literasi digital antar daerah
 3. Peningkatan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan di media online dan media sosial
 4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang
 5. Meningkatnya peredaran informasi dan promosi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak benar dan menyesatkan
 6. Krisis kesehatan global terutama terkait emerging disease
 7. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, farmasi dan pangan olahan yang cepat
 8. Kurangnya peran lintas sector terkait dalam pengawasan yang menjadi kewenangannya

Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi 2. Komitmen Kepemimpinan yang kuat 3. Kompetensi SDM 4. Pemanfaatan Teknologi 5. Laboratorium tersertifikasi 6. Sarana pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas kelembagaan BPOM yang belum optimal 2. Jumlah dan distribusi SDM yang belum memadai 3. Adanya gap kompetensi SDM 4. Sistem Teknologi Informasi yang belum terintegrasi dan tidak optimal 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 6. Dukungan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang optimal
Oportunities	Threats
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi perekonomian wilayah kerja yang berkembang pesat 2. Kondisi sosial wilayah kerja yang berkembang 3. Kerjasama dengan stakeholder telah terjalin dengan baik 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 5. Penerapan Teknologi Informasi dan digitalisasi 6. Kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung 7. Kebijakan suprasistem terkait sediaan farmasi dan pangan olahan 8. Penguatan isu kesehatan global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan di bidang Obat dan Makanan yang masih rendah 2. Terdapat ketimpangan sosial yang cukup tinggi antar daerah kabupaten / kota di wilayah kerja 3. Peningkatan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan di media online dan media sosial 4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang 5. Meningkatnya peredaran informasi dan promosi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak benar dan menyesatkan 6. Krisis kesehatan global terutama terkait emerging disease 7. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, farmasi dan pangan olahan yang cepat 8. Kurangnya peran lintas sector terkait dalam pengawasan yang menjadi kewenangannya

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG

2.1 Visi BBPOM di Bandung 2025 – 2029

Visi merupakan gambaran besar tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan kedepan. BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Wilayah Jawa Barat telah merumuskan Visi 2025-2029 yang sejalan dengan Visi Badan POM Renstra 2025-2029. Penyusunan Visi BPOM ini juga telah berpedoman dengan Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang diusung BBPOM di Bandung untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini menggambarkan peran serta BBPOM di Bandung dalam mendukung dedikasi BPOM memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen di wilayah Jawa Barat, serta meningkatkan daya saing produsen produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat bersaing dilingkungan nasional maupun kancah internasional. Visi BBPOM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Bandung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk palsu, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BBPOM di Bandung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah Jawa Barat memiliki kualitas yang tinggi dan sesuai dengan standar persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produk, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional, terutama untuk produk yang diproduksi oleh produsen di Jawa Barat.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BBPOM di Bandung mendukung dan berperan aktif menciptakan industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional yang dapat bersaing di pasar nasional dan global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar nasional dan internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Bandung adalah mendukung terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sehat dan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Selain dengan itu, masyarakat yang sehat dapat tercapai dengan masyarakat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat/bergizi. Maka dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan BBPOM di Bandung juga menekankan pada pentingnya pemberian informasi

yang benar mengenai informasi pada label pada kemasan, seperti informasi nilai gizi, informasi pada iklan produk, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi, serta pola konsumsi pangan yang sehat.

Sebagai salah satu UPT, BBPOM di Bandung juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit menular banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat Jawa Barat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi Presiden. Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

2.3 Tujuan BBPOM di Bandung

Dalam rangka mewujudkan Visi dan pelaksanaan Misi, BBPOM di Bandung telah merumuskan serangkaian tujuan strategis periode Tahun 2025 – 2029, yang disusun mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi. Tujuan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.
Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan

Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan focus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya yang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:
Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif.
Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease.
2. Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor
Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

3. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta otomatisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.
4. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.
5. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:
Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.
6. Meningkatkan efektivitas KIE di Jawa Barat
Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
7. Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
8. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.
9. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

10. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator SK
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
			Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
			Jumlah desa pangan aman
			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
		Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator SK
ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Keberpihakan pada UMKM		
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan			

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator SK
			Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Jawa Barat	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung
		Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung
			Nilai AKIP Balai Besar di Bandung
			Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung
			Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung

BBPOM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM di wilayah Jawa Barat merumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan arah kebijakan Badan POM, sehingga semua upaya pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BBPOM di Bandung akan selalu selaras dan mendukung arah kebijakan BPOM. Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BBPOM di Bandung periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor daerah dan nasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BBPOM di Bandung secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029 meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka **penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan** antara lain pengaturan mengenai:
 - a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
 - b. **penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;**
 - c. **penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;**
 - d. **informasi nilai gizi pada bagian depan label;**
 - e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - f. sampling dan pengujian;
 - g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
 - h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
 - i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan;
 - j. penyerahan obat di *hypermarket*, *supermarket*, dan *minimarket*;

- k. penandaan obat;
 - l. periklanan dan promosi obat;
 - m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan
 - n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
- a. cara sanitasi yang baik;
 - b. persyaratan cemaran pangan olahan
 - c. bahan tambahan pangan;
 - d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
 - e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
 - f. iradiasi pangan;
 - g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
 - h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;
 - i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
 - j. bahan penolong;
 - k. tata cara pendaftaran sarana produksi;
 - l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
 - m. persyaratan impor pangan olahan;
 - n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
 - o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
 - p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
 - q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
 - r. label pangan; dan
 - s. iklan pangan.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 memuat aspek: 1] kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2] tata laksana antarunit organisasi; dan 3] pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kedudukan BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Jawa Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Susunan organisasi Balai Besar POM di Bandung terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi

komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Obat dan Makanan di daerah, BPOM mempunyai 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan wilayah kerja 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Di wilayah Jawa Barat, Badan POM memiliki 3 UPT, yaitu Balai Besar POM di Bandung, Balai POM di Bogor dan Balai POM di Tasikmalaya, dengan pembagian wilayah masing-masing.

Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan kapasitas kelembagaan tersebut, terjadi perbedaan kualitas dan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta adanya keterbatasan dan kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi, karena masing-masing UPT bertanggung jawab langsung ke Kepala Badan. Sehingga diperlukan penataan organisasi UPT BPOM.

Penataan organisasi UPT BPOM perubahan bentuk organisasi menjadi instansi vertikal. Hal ini dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan jelas, dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

4.4.2 Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BBPOM di Bandung tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja Tim Kerja antar kelompok substansi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penataan hubungan kerja antar Tim Kerja bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa struktur organisasi Tim Kerja yang dibentuk telah tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi.

Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan Nasional dalam hal Transformasi Tata Kelola khususnya melalui: 1] penyederhanaan dan penguatan proses bisnis yang menyelaraskan dengan upaya integrasi proses bisnis pemerintah untuk mewujudkan SPBE; 2] transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan 3] perkuatan system antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan.

Penatalaksanaan di BBPOM di Bandung dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan system pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

Sistem Manajemen Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses

(*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*).

Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen. Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit eksternal untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal bertujuan untuk adanya efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi pada lingkup BPOM. Sertifikasi/Akreditasi ISO digolongkan pada sifat sebagai berikut:

A. Bersifat mandatory atau wajib, untuk lingkup:

1. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, bagi BPOM sebagai satu entitas organisasi melalui pelaksanaan audit eksternal secara multi-site. Seluruh unit organisasi masuk dalam lingkup sertifikasi selambatnya 3 (tiga) tahun setelah unit organisasi terbentuk;
2. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, bagi unit organisasi yang menjalankan fungsi pengujian dengan akreditasi selambatnya 5 (lima) tahun setelah fungsi pengujian dijalankan;
3. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi unit organisasi yang mengkoordinasikan pengelolaan data dan keamanan informasi;

B. Bersifat voluntary atau sukarela, untuk lingkup:

1. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
2. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan; dan
4. Sistem manajemen/pedoman lainnya yang relevan.

Transformasi *Digital Structure* dan *Digital Process*

Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui *digital structure* dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja (*squad team*) dengan memanfaatkan SPBE. *Digital structure* merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal *online* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*citizen-centric*). Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi.

4.4.3 Pengelolaan SDM Aparatur

A. Kebutuhan SDM

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, BBPOM di Bandung mengemban tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPOM di Bandung perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BPOM Tahun 2025-2029, kebutuhan SDM BBPOM di Bandung adalah sebanyak 204 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 149 orang. Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 73,04%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 55 orang.

B. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis BBPOM di Bandung 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BBPOM di Bandung periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) di BPOM, sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggerakannya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System (LMS)* dan *Knowledge Management System (KMS)* terintegrasi yang dimiliki BPOM, mendukung pengembangan SDM Aparatur BBPOM di Bandung dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui mengikutsertakan pegawai dalam manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun *expertise* di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor *talent scouting*, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan.

Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detail dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten

Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja,

serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.

2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten

Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun *expertise* bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi *second layer* untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan *expertise* di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui *talent scouting*, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta.

Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Coporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian *output* pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence*, dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang

dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, *social* dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship*, *initiative taking*, dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan *complex information processing* juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi *skill shifting* ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

DRAFT

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, disusunlah matriks kinerja Unit yang akan menjadi sasaran keberhasilan dan bahan evaluasi BBPOM di Bandung dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan Visi dan Misi BBPOM di Bandung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian Tujuan BBPOM di Bandung dalam periode Tahun 2025-2029. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini dijadikan sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Matriks kerangka kinerja BBPOM Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88	89.75	91.5	93.25
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.5	89.5	91.25	92.5	94
	8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
	9 Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	68.75	69.75	70.75	71.75	72.75

		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	85.68	88.08	90.48	92.28
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	63	68	71	75
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandung	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94	87,81	88,68	89,55	90,42
	15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	23	24	26
	16	Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.50	83.5	84.5	85.5	86.5
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	75	80	85	85	90
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	91	92	93	94
Layanan Publik BBPOM di	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90

Bandung yang Prima							
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar di Bandung	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
	23	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
	24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94,08	94,40	94,68	94,96	95,29
	25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandung	2.95	3	3.05	3.1	3.15

4.1.1 Kegiatan Strategis Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemeriksaan sarana Produksi sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin dilakukan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. sehingga

Pemeriksaan sarana produksi meliputi :

- a. Pemeriksaan sarana produksi obat
- b. Pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam
- c. pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan
- d. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik
- e. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
 - o Sarana produksi pangan olahan
 - o Sarana produksi pangan fortifikasi
 - o Sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

2) Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemeriksaan sarana distribusi produk sediaan farmasi dan pangan olahan dilaksanakan secara rutin disepanjang rantai pasok jalur distribusi mulai dari produsen sampai ke konsumen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang sampai ke tangan produsen, masih tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

Pemeriksaan sarana distribusi, meliputi :

- a. Pemeriksaan sarana distribusi obat
 - o PBF
 - o Pelayanan Kefarmasian
- b. Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam
- c. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan
- d. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik
- e. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

3) Peningkatan Pelayanan Publik

- a. Pemberian Informasi Obat dan Makanan
- b. Sertifikasi sarana Produksi Obat dan Makanan
- c. Sertifikasi sarana Distribusi Obat
- d. Penerimaan layanan pengaduan masyarakat
- e. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik
- f. Pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ke-3

4) Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

- a. KIE secara langsung (luring n online)
- b. KIE secara tidak langsung (penyebaran informasi, ILM)
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui SAKA POM

5) Pemberdayaan Komunitas Sekolah, Desa dan Pasar

Pemberdayaan komunitas Sekolah, Desa dan Pasar merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, khususnya di lingkungan Sekolah, Desa dan Pasar.

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang aman.

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan produk yang harus dijaga kualitasnya karena makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah akan mempengaruhi kesehatannya. Manusia yang sehat merupakan aset bangsa yang berharga karena merupakan penerus bangsa yang harus menjadi manusia yang unggul melalui asupan makanan yang berkualitas baik dan bergizi.

Desa Pangan Aman

Pemahaman bahwa masyarakat harus menggunakan Obat dan Makanan yang berkualitas perlu tersampaikan ke tingkat individu di desa

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar adalah sumber bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan pangan sehari-harinya maupun pembelian bahan baku bagi usaha pangannya sehingga pasar yang aman dari

bahan berbahaya merupakan garda terdepan dalam penyaringan dan pengendalian peredaran bahan pangan atau pangan yang mengandung bahan berbahaya

6) Pengawasan Produk sediaan farmasi dan pangan olahan

- a. Pengawasan produk obat
- b. Pengawasan produk Obat Tradisional
- c. Pengawasan produk suplemen kesehatan
- d. Pengawasan produk kosmetik
- e. Pengawasan produk pangan olahan
- f. Pengawasan produk PIRT
- g. Peningkatan efektifitas penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

7) Pengujian Obat dan Makanan

- a. Pemenuhan standar Good Laboratory Practice (GLP), yang merupakan pedoman yang mengatur tata cara kerja di laboratorium untuk menjamin kualitas data dan hasil pengujian
- b. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji termasuk seluruh obat publik yang ada di e-catalog untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

8) Pemberantasan Kejahatan bidang Obat dan Makanan

- a. Pencegahan kejahatan dibidang Obat dan Makanan
 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan
 - Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan
 - Penggalangan stakeholder dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
- b. Intelijen Obat dan Makanan
 - Operasi intelijen
- c. Pelaksanaan operasi Siber dalam rangka pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui media daring
- d. Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

9) Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar dan mutu

Kegiatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar dan mutu bertujuan untuk membantu dan mendorong Pelaku usaha UMKM dapat memenuhi persyaratan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha, kegiatan audit pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar dan mutu, kegiatan pendampingan perbaikan atas temuan audit, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Pelaku Usaha secara konsisten.

10) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Kerja sama lintas sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas tetap tinggi, serta responsif terhadap dinamika dan risiko baru yang muncul. Dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan hingga tahun 2029 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai pihak, BPOM dapat memperkuat pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

4.1.2 Kegiatan Strategis Dukungan Manajemen

1) Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata

kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

2) **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

- a. Implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam system manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, implementasi reformasi manajemen kinerja ASN, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Implementasi pola karier SDM dan monitoring serta evaluasi

3) **Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, BBPOM di Bandung perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui:
 - Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;
 - Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.
- b. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui:
 - Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan BPOM, dan;
 - Penambahan Katalog Sektor Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.
 - Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 - Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi Badan POM dan eksternal dan;

- Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP

4) **Pengembangan SDM Aparatur Badan POM**

SDM Aparatur Badan POM, disebut juga dengan SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aset organisasi yang secara pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, professional dan kompeten.

Pengembangan SDM POM dilaksanakan dengan meningkatkan kompetensi teknis dan manajemen sosial kultur, yang dilaksanakan secara terencana sesuai dengan grand sesign pengembangan SDM POM yang telah dibuat.

5) **Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan**

BBPOM di Bandung sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam implementasi SPBE, BBPOM di Bandung telah melakukan digitalisasi pelaksanaan kegiatan melalui beberapa aplikasi yang telah dikembangkan, dan membantu dalam penyelenggaraan layanan publik, pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan pelaksanaan proses bisnis internal, sehingga lebih cepat, mudah diakses dan akuntabel.

6) **Penguatan pengelolaan keuangan**

Penguatan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

7) **Penguatan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu.

Penerapan manajemen risiko dapat membantu BBPOM di Bandung dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mencapai target sasaran kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut :

Program	Alokasi (Rp ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan	46.635.378	48.967.146	51.415.503	53.986.278	56.685.591
Dukungan Manajemen	19.755.565	21.731.121	22.817.677	23.958.560	25.156.488
TOTAL	66.390.943	70.698.267	74.233.180	77.944.838	81.842.079

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantang pengawasan BBPOM di Bandung dalam kurun waktu 2025-2029 dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Bandung yang sudah ditetapkan. Dengan kerangka pendanaan ini, BBPOM di Bandung diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan meningkatkan cakupan pengawasan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE yang dapat menjangkau masyarakat diseluruh wilayah kerja, guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung, dengan peningkatan SDM dan sarana prasarana serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan artificial intelijen, guna meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja.

BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor xxx Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Renstra BPOM tahun 2025-2029.

Renstra BBPOM di Bandung tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman untuk perencanaan menengah dan tahunan dan dijadikan acuan kerja di lingkungan di BBPOM di Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua kelompok substansi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BBPOM di Bandung. Dengan demikian pencapaian hasil pelaksanaan Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Badan POM Tahun 2025-2029.

DRAFT

Kepala Balai Besar POM di Bandung,

Drs, I Made Bagus Gerametta, Apt

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Keterangan	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	9,1	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung		90	91	92	93	94							
	SK.10 Layanan Publik UPT yang Prima														
	10,1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,70	4,75	4,80	4,85	4,90							
	SK.11 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal														
	11,1	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung		91,5	91,75	92,0	92,25	92,50							
	11,2	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung		83,10	83,25	83,40	83,55	83,70							
	11,3	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung		5	5	5	5	5							
	11,4	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung		2,95	3	3,05	3,1	3,15							